

# **EVALUASI DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MdP)(STUDI IMPLEMENTASI DESA KERTA, KECAMATAN PAYANGAN,KABUPATEN GIANYAR)**

**I Wayan Raka Oka Diraka**  
*Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Udayana  
1021205004  
e-mail : [rakaokadiraka@gmail.com](mailto:rakaokadiraka@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

*This research taking subject on Impact Evaluation of Indonesian Government's Community Empowerment Program called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MdP) which held on Kerta Village, Payangan District, Gianyar Regency. This village used to be count as underdeveloped village by The Government of Gianyar. The impact is mostly positive, like the community tends to have more critical minds recalled that the majority community of Balinese Village still had a traditional mind which is very tough, the program create a better infrastructure of the village. Hopefully, the government decide to extend the program which now has been issued to be stopped on 2015.*

*Keywords : Evaluation, Impact, Participation, Policy, PNPM Mandiri Perdesaan*

## **1. PENDAHULUAN**

Tingkat kemiskinan adalah salah satu hal yang disoroti dalam proses pembangunan di negara berkembang. Semakin banyak penduduk yang miskin, berarti pembangunan di negara tersebut belum berjalan semestinya. Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan seperti, inflasi, rendahnya penggunaan teknologi dalam suatu daerah, akses yang sulit ke daerah pusat/terpencil, tidak memiliki modal untuk pembuatan usaha, dan yang paling parah adalah korupsi. Di Indonesia sendiri, akses transportasi menjadi kendala tambahan karena faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga dalam pemberian bantuan ataupun hanya pemeriksaan saja sudah memakan begitu banyak anggaran dan itupun jika anggarannya tidak dilebih-lebihkan.

Pemerintah memutuskan untuk membuat suatu program berskala nasional yang nantinya akan dijalankan diseluruh desa dan kota untuk menanggulangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Karena banyaknya penduduk Indonesia yang tersebar dan memiliki masalahnya masing-masing, program ini diharapkan dicanangkan, dibentuk dan dijalankan sendiri oleh masyarakat dengan

bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2007, pemerintah meresmikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Saat itu PNPM terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri dengan dasar hukum yaitu Inpres No. 5/1993 yang meliputi tiga komponen yaitu bantuan modal usaha untuk pengembangan, bantuan pendampingan dan bantuan pembangunan prasarana Pendukung Desa Tertinggal. Untuk menggunakan dana tersebut, masyarakat harus ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian yang dilakukan dalam sistem musyawarah berjenjang, dimulai dari Musyawarah Kelompok, lalu Musyawarah Dusun/Banjar, kemudian Musyawarah Desa, Musyawarah Antar Desa dan tahap terakhir yaitu Musyawarah Tertinggi. PPK yang berfokus pada pengembangan kecamatan pada tahun 2007, dipertajam lagi ruang lingkupnya menjadi sebuah program untuk pembangunan desa, yaitu PNPM Mandiri.

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang cukup berperan dalam pengadaan devisa negara karena banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara

yang mengunjunginya. Sekilas Bali terlihat sebagai pulau yang kaya dimana masyarakat yang tinggal di Bali pasti makmur dan sejahtera. Tapi, kenyataan berkata lain dimana masih banyak penduduk yang miskin di Bali. Penyebabnya karena akses jalan yang susah dan jauh dari pusat kota, minimnya teknologi karena faktor alam sehingga menghalangi sinyal satelit maupun telepon genggam, masih takut untuk mencoba hal baru dan banyaknya penduduk yang migrasi ke kota untuk mendapatkan kehidupan lebih layak sehingga meninggalkan desanya. Tetapi, ada pula kabupaten yang memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi dan angka kemiskinannya juga tinggi. Kabupaten Gianyar yang terletak ditengah Pulau Bali, memiliki banyak objek wisata dan alam contohnya adalah Ubud, Goa Gajah, Spot untuk olahraga air dan masih banyak lagi. Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan mendukung secara penuh pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan yang akhirnya berhasil membawa Kecamatan Payangan menjadi Kecamatan Terbaik di Indonesia dalam hal pelaksanaan PNPM Mandiri. Kecamatan Payangan terdiri dari 9 Desa aktif yaitu Desa Bresela, Desa Buahon, Desa Buahon Kaja, Desa Bukian, Desa Kelusa, Desa Kerta, Desa Melinggih, Desa Melinggih Kelod dan Desa Puhu. Selama satu tahun pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan masing-masing desa akan mendapatkan alokasi dana sesuai dengan skala prioritas. Desa Kerta dimana penelitian ini akan berjalan, dalam beberapa tahun terakhir selalu memasuki posisi teratas dalam tingkat prioritas. Di Desa Kerta, sebagian besar akses menuju dusunnya harus ditempuh dengan melewati tebing, jalanan yang menanjak dan turunan yang cukup curam. Desa Kertapernah diberikan status desa tertinggal oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Seberapa efektif dan efisien program ini berjalan dan apa saja dampak yang terjadi setelah program ini berjalan adalah masalah-masalah yang perlu dievaluasi untuk pengembangan agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### A. Pemberdayaan Masyarakat

*Empowerment Concept* atau Konsep Pemberdayaan menurut Merriam Webster dan

Oxford English Dictionary (dalam Luthfan, 2012) mengandung dua pengertian :

1. *Empowerment is to give power or authority to.* Pemberdayaan adalah bagaimana pendelegasian sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memberikan keputusan yang paling tepat terhadap masalah yang dihadapi atau pelaksanaan suatu program.
2. *Empowerment is to give ability or enable to.* Pemberdayaan diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu kewenangan dengan menggunakan apa yang dimiliki baik untuk tujuan pribadi maupun secara masyarakat. Dalam pengertian ini memiliki unsur ekonomi dimana setelah diberdayakan masyarakat mampu untuk berusaha meningkatkan harkat dan martabat dan melepaskan diri dari kondisi kemiskinan.

Menurut Sumodiningrat dalam Rachmawan (2012), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Rachmawan (2012), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

## **B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MdP)**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

- a. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan,
- b. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan

- partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan
- c. Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

## **3. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan yang mengambil tempat di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan secara induktif dimana peneliti ingin menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan dan interaksi yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tanpa adanya intervensi dari peneliti dan juga menggunakan metode Evaluasi Formal Proses Retrospektif dimana evaluasi ini meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi Proses Retrospektif berfokus pada kegiatan aktivitas program yang berhubungan dengan keluaran dan dampak.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebuah program yang ditujukan kepada masyarakat untuk membangun sendiri daerahnya. Meski demikian, program ini memiliki beberapa prosedur yang harus dijalankan. Sebelum turun

ke tingkat Desa/Pelaksana Program, terlebih dahulu diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kecamatan atau yang lebih dikenal dengan nama Musyawarah Antar Desa (MAD). MAD adalah sebuah forum yang diadakan untuk menentukan prioritas usulan yang nantinya akan ditetapkan menjadi sebuah program pada tahun berikutnya. Forum ini difasilitasi oleh Kecamatan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD adalah hasil keputusan bersama dari kerjasama antar desa yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil program dalam bentuk kelembagaan.

Ketentuan tentang BKAD diatur dalam Peraturan Bupati Gianyar No. 75 Tahun 2013. Dimana disinggung bahwa BKAD berfungsi untuk pengelolaan perencanaan partisipatif, pelaksanaan swakelola pembangunan, pengelolaan kegiatan dana bergulir, dan fungsi-fungsi lainnya. Masa kerja kepengurusan didalam kelembagaan antar desa dibatasi dalam periode kepengurusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). BKAD secara lebih rinci adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. Sesuai PP 72 Tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Dalam MAD Penetapan Usulan di tingkat Kecamatan, masing-masing desa diwakili oleh 6 orang Delegasi (Kepala Desa, Tokoh Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)), harus beranggotakan 3 orang perempuan yang membawa usulan-usulan desa yang nantinya diranking dalam MAD. Hasil yang nantinya disepakati, diharapkan sesuai dengan kondisi nyata di daerah dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam forum ini, masing-masing delegasi Desa akan membawa 3 usulan dan nantinya seluruh delegasi akan dipecah menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 9 orang (sesuai dengan jumlah Desa di Kecamatan Payangan)

yang akan menilai semua usulan. Usulan yang diberikan meliputi kegiatan sarana prasarana dasar atau peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diusulkan oleh Musyawarah Desa Khusus Perempuan, Usulan pendanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang besarnya 25% dari BLM kecamatan, dan Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa Perencanaan. Usulan tersebut wajib ditetapkan berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes).

Jika delegasi kurang dari 6 orang atau delegasi perempuan tidak berjumlah 3 orang maka dianggap Desa tersebut tidak mampu menghadirkan wakilnya dan nilainya akan berkurang. Setelah penilaian dalam kelompok telah selesai dilakukan, maka nilai itu akan diakumulasikan dalam sidang pleno untuk menentukan usulan mana yang akan menempati ranking teratas setelah dilakukan penilaian. Setelah mendapatkan urutan prioritas pelaksanaan program sesuai ranking beserta dengan berapa alokasi dana yang dibutuhkan, lalu disesuaikan dengan dana yang diterima oleh Kecamatan setelah dana tersebut dipotong oleh Dana Operasional.

Pencairan dana BLM yang bersumber dari APBN mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Besaran dana BLM dari APBD harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

Penyaluran dan dilakukan dari rekening kolektif BLM yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan kepada Tim Pengelola Kegiatan di Desa. Mekanisme awal adalah pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK diketahui oleh Camat dan Perbekel/Kepala Desa. Setelah itu TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen perencanaan kegiatan. Setelah itu dilengkapi lagi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

Setelah dana dipergunakan maka TPK wajib memberikan laporan akhir. Dana Operasional UPK maksimal sebesar 2% dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut, dan Dana Operasional TPK maksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan. Pencairan dana PNPM dilakukan dalam 3 tahap. 40% Pada tahap I, 40% Pada tahap II, 20% Pada tahap III apabila proporsi anggaran 80% APBN dan 20% APBD. Jika proporsi anggaran 60% APBN dan 40% APBD, maka pada tahap I dilakukan pencairan dana sebesar 40% dari APBN, lalu pada tahap II dilakukan kembali pencairan dari APBN sebesar 20% dan pencairan dari APBD sebesar 20%, dan pada tahap III, dana dicairkan dari APBD sebesar 20%. Jika 100% dana berasal dari APBN, maka pada tahap pertama pencairan dilakukan dengan maksimal 40% dari total anggaran, pada tahap II dana akan dicairkan 40% dan pada tahap III seluruh sisa dana yang belum dicairkan akan dicairkan.

Pencairan Dana dilakukan setelah turunnya Surat Perintah Camat (SPC) pada setiap tahapan. SPC hanya boleh diterbitkan maksimal 3 kali. Penerbitan SPC biasanya dilakukan pada bulan Maret – Mei. Untuk pencairan Tahap I seluruh dana sebesar atau kurang dari 40% total anggaran dibebankan kepada APBN. Untuk Pencairan Tahap II, akan dilakukan sebesar 40% dari total anggaran kegiatan yang berasal dari komposisi antara APBN dan APBD atau seluruhnya dibebankan ke APBD. Pencairan Tahap III seluruh dana berasal dari APBN sebesar sisa dari anggaran yang dibutuhkan, atau bisa dicairkan dari APBD apabila menggunakan komposisi APBN 60% dan APBD 40%. Dalam pencarian dana, setiap SPC dilengkapi dengan SPPB antara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Anggaran setiap usulan dibuat oleh Tim Pembuat Usulan (TPU) melalui Musrenbangdes.

PNPM Mandiri Perdesaan sudah dilaksanakan di Desa Kerta dimulai dari tahun 2003 sejak masih bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pembangunan infrastruktur, terutama jalan produksi, jalan usaha tani, jalan lingkungan dan drainase masih menjadi fokus disebabkan kondisi geografis desa yang terletak di wilayah

pegunungan. Sulitnya akses masyarakat untuk menjual hasil bumi/ panennya seperti bambu, daun pisang dan beragam sayur-sayuran membuat program ini difokuskan di infrastruktur jalan yang diharapkan dapat meningkatkan akses dari masyarakat produksi kepada penjual. Selain pembangunan infrastruktur, Desa Kerta juga memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu baik berupa beasiswa, bantuan alat tulis dan kelengkapan sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK tanpa perantara sekolah. Sekolah dalam hal ini membantu untuk mengumpulkan anak-anak kurang mampu, verifikasi data dilakukan oleh Kepala Dusun/Banjar. Untuk tingkat TK, Desa Kerta membangun Gedung TK yang sekarang sudah dibangun 2 buah gedung TK. Untuk tahun 2014, 2 usulan Desa Kerta diberikan alokasi dana dari sistem perankingan di Kecamatan, yaitu pembuatan saluran irigasi dan Pemberdayaan Pelatihan Rebung Bambu oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang keduanya mengambil tempat di Banjar Penyabangan. Proses perankingan biasanya menuai kecemburuan sosial di masyarakat dimana Tim Penilai dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian ditambah pelaksanaan program yang hanya dijalankan di Banjar tertentu saja. Mengatasi hal tersebut, Kepala Desa Kerta mengambil inisiatif dengan mendatangkan Tim Verifikasi dari Kecamatan yang dianggap independen dan tidak memiliki kepentingan tertentu di Banjar itu. Perankingan yang dilakukan di Musrenbangdes, selain nilai rata-rata yang didapat dari hasil penilaian per dusun, juga ditambahkan penilaian individu dan riil yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi. Penilaian Tim Verifikasi dilakukan secara rahasia dan tidak dipublikasi hingga Musrenbangdes mencapai ketetapan. Penilaian ini bisa merubah perankingan yang sudah dilakukan karena nilainya bisa bertambah maupun berkurang tergantung dari nilai Tim Verifikasi. Selain itu program yang ada tidak mungkin berjalan secara bersamaan karena keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada. Untuk Banjar yang usulannya tidak lolos didanai oleh PNPM, Pemerintah Desa mensubsidi alokasi dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah sehingga pembangunan tetap berjalan. Implementasi

Program dalam bidang infrastruktur jalan dianggap efektif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Terlaksananya pembuatan jalan produksi mampu meningkatkan penjualan masyarakat terutama penjual daun pisang dan kayu atau bambu dimana harganya akan meningkat bila barang tersebut lebih mudah diambil oleh pengepul.

Sayangnya data statistik kemiskinan dianggap kurang riil. Terjadinya peningkatan angka Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Kerta menuai kritik dari Kepala Desa Kerta. Berdasarkan realita di lapangan ada pengurangan angka kemiskinan, berbeda dengan yang dipublikasikan data statistik. Semenjak infrastruktur dibangun, masyarakat mau berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perkembangan pun terlihat sejak awalnya berdagang dengan berjalan kaki hingga akhirnya mampu membeli alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil. Data statistik yang ada diragukan validitasnya karena terjadi kesalahan dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program PNPM sesuai dengan prinsipnya menekankan kepada kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian ini adalah masyarakat laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan peran terhadap program dan dalam menikmati manfaat pembangunan. Program khusus perempuan salah satunya adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu peminjaman dana untuk kelompok perempuan yang besaran alokasinya 25% dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan. Terdapat dua jenis SPP, SPP dengan dana BLM yang sudah dialokasikan di setiap program, dan SPP Perguliran yang berasal dari dana mengendap. Dengan maksimal pinjaman 2 juta per 1 orang dan 1 kelompok terdiri dari 5-10 orang juga tidak menggunakan jaminan, SPP merupakan tambahan modal yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Pengembalian dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun setelah dana didapat. Sebelum mendapat ijin untuk melakukan peminjaman SPP, kelompok akandiverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi dari Kecamatan. Pemberian Usulan kelompok yang akan meminjam dana SPP sekaligus pengkoordiniran kelompok, sosialisasi dan pengawasan dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Perempuan di Desa tanpa ada campur tangan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri di Desa Kerta tidak mengalami kendala yang begitu signifikan sehingga membuat program itu tertunda maupun terhenti. Pada tahapan perencanaan program kendala yang terjadi adalah masyarakat atau para pelaku PNPM masih proses pembelajaran. Karena dikerjakan oleh masyarakat sendiri pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dirasa masih sulit karena tidak terbiasa. Selain itu kendala yang terjadi adalah kurangnya SDM untuk pelaksanaan program seperti pembuatan desain gambar dsb, sehingga masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Pada saat pelaksanaan program infrastruktur jalan, kendala yang sering terjadi kebanyakan berupa kendala teknis. Selama pelaksanaan program, kendala tentang lambatnya turun dana tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Desa Kerta. Permasalahan terkait dana yang timbul adalah saat masyarakat salah melakukan pengukuran jalan yang akan dilaksanakan. Masalah itu timbul karena masyarakat tidak melakukan *cross-check* terhadap usulan yang sudah lama, sehingga terlihat saat masyarakat sudah mulai bekerja. Perencanaan pembuatan jalan sepanjang 1,366 Meter yang menghubungkan Pura AlasAngker dengan Dusun Kerta seharusnya memiliki panjang jalan 1,420 Meter. Untuk mengatasinya, masyarakat melakukan swadaya dana sebanyak jumlah yang kurang dengan difasilitasi oleh Kepala Desa. Permasalahan lain terkait dana adalah naiknya harga setelah satu tahun masa perencanaan. Usulan program PNPM beserta alokasi dan rencana anggaran yang akan dibutuhkan mulai diperhitungkan setahun sebelum program tersebut berjalan. Banyaknya kejadian selama satu tahun setelah perhitungan membuat harga bahan-bahan yang diperlukan menjadi naik. Untuk tahun 2014, Pemerintah Pusat melakukan pemotongan anggaran sebesar 11,8% didalam program PNPM Tahun 2014 melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri No. 009/5383/PMD. Pemotongan ini bertujuan untuk melakukan penghematan anggaran pada APBN tahun 2014. Pelaksanaan program harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya meskipun dana telah dipotong, inilah yang menjadi kendala di masyarakat. Bagi para pelaku PNPM dilapangan ini dirasa memberatkan. Bantuan yang diberikan tidak seharusnya dipotong mengingat ada kegiatan yang sudah 80% rampung. Pemotongan

anggaran bisa menyebabkan program tertunda hingga beberapa hari atau bisa saja membuat kualitas jalan tidak seperti yang diharapkan karena sebelumnya belum pernah dilakukan pemotongan anggaran untuk PNPM. Kendala yang dialami oleh Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagian besar adalah kredit macet. SPP adalah bantuan modal khusus diberikan kepada kelompok perempuan miskin untuk memajukan usahanya dan tidak boleh diberikan kepada perseorangan dan atau laki-laki. Mungkin karena hasil penjualan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga pengembalian uang menjadi terhambat. Pengawasan terhadap SPP dilakukan oleh masyarakat desa dan Kepala Desa sehingga proses pengembalian bisa berjalan lancar. Apabila terjadi kredit macet, maka kelompok tersebut akan susah meminjam kembali pada saat program berikutnya karena dikhawatirkan masih mengalami hal yang sama. Untuk menyalasi ini, kelompok tersebut diberikan tenggang waktu tambahan untuk melakukan pengembalian modal.

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian. Masyarakat dihimbau untuk berperan secara aktif dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil agar hasil program benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Visi PNPM Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin Perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kemandirian berarti mampu untuk mengorganisir diri untuk mobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut. Menurut Rogers dalam Suryono (2010), pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material, bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik. Pelaksanaan PNPM di Desa Kerta telah memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat sebelumnya tidak pernah merencanakan, memimpin dan menyosialisasikan program seperti tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Keterlibatan masyarakat secara umum adalah melalui gotong royong, seperti pembersihan badan jalan dan pembuatan badan jalan dilakukan dengan swadaya tanpa dibayar. Untuk tenaga harian yang dibayar, pembayaran disesuaikan dengan Hari Orang Kerja (HOK) dengan batasan maksimal 6 jam dalam satu hari. Sekali bekerja masyarakat biasanya mendapat upah antara 10-20rb per jam kerja. Anggaran untuk swadaya ini direncanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga sangat transparan. Pembayaran tenaga kerja ini dirasa mampu untuk meningkatkan pemasukan bagi masyarakat. Proses perekrutan para pekerja ini pun tanpa melalui paksaan. Siapapun masyarakat yang ingin bekerja akan dihitung dan didata oleh Klian Banjar (Kepala Dusun) tempat program dilaksanakan. Sebelumnya diadakan sosialisasi oleh TPK tentang program yang akan berjalan, pada bulan apa program akan berjalan serta berapa bayaran yang diberikan apabila ada yang mau bekerja. Tidak ada perbedaan gender dalam artian perempuan pun boleh bekerja untuk pembangunan jalan, sesuai dengan prinsip utama pelaksanaan PNPM. Setelah mampu merencanakan dan melaksanakan program sendiri, masyarakat justru mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam pemberian bantuan. Perbedaan kualitas yang sangat signifikan mampu terlihat pada program yang dilaksanakan oleh masyarakat dan yang diberikan oleh Pemerintah. Diharapkan saat pemberian bantuan, untuk pelaksanaan diberikan kewenangan secara penuh kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri yang tahu kebutuhan mereka. PNPM dinilai telah sangat transparan dalam pengelolaan karena masyarakat yang menentukan maka pengawasan menjadi lebih mudah karena masyarakat tahu berapa harga bahan-bahan dsb. Selain itu, PNPM tidak memiliki indikator untung atau rugi melainkan indikator kebutuhan atau tidak butuh. Jika tidak ada model bantuan seperti PNPM, bantuan lain akan susah didapatkan oleh masyarakat diluar alasan bahwa bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Ekowati dkk. (2005), Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang

dihadapi. Poin yang ditekankan adalah kesesuaian penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran, serta memberikan hasil positif. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kerta terbukti terlaksana dengan sangat baik. Terbukti dari hasil wawancara masyarakat miskin penerima manfaat yang merasa mendapatkan peningkatan penghasilan. Ini sejalan dengan tujuan utama PNPM Mandiri Perdesaan yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyasar masyarakat miskin, program ini mampu untuk membuat masyarakat berusaha lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. Respon dari masyarakat yang menginginkan penambahan anggaran karena dinilai seluruh permasalahan akan selesai lebih cepat dengan dana yang lebih adalah salah satu bukti pemikiran kritis yang dihasilkan. Walaupun sempat merasa kecewa karena bantuan pemerintah berupa infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi masyarakat beranggapan positif sejak seluruh proses pemberian bantuan tersebut dimulai dari perancangan hingga pertanggungjawaban akhir dikelola oleh masyarakat. Maka sejauh ini, dapat dikatakan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah berhasil.

PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk membangun desa dari tangan masyarakatnya sendiri. PNPM Mandiri memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memformulasikan dan melaksanakan semua kegiatan yang akan dibantu didanai oleh pemerintah. Pembangunan masyarakat desa seperti yang diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha dalam bukunya (1999) memberikan beberapa kriteria yaitu :

1. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat terlihat dari gotong royong, kegiatan swadaya, kelompok SPP dan pekerja harian selama pelaksanaan program. Masyarakat sendiri yang merancang dan membangun apa yang menjadi kebutuhan mereka. Masyarakat mendaftarkan diri untuk ikut andil dalam pelaksanaan program tanpa paksaan dari Kelian (Kepala Dusun), Perbekel (Kepala Desa) atau dari siapapun. Kemauan masyarakat untuk pembangunan ini didasari keinginan untuk meningkatkan taraf

hidup mereka karena mereka dapat melakukan pekerjaan harian yang dananya dialokasikan dalam RAB usulan dan disesuaikan dengan Hari Orang Kerja (HOK), sehingga mereka mampu untuk menghasilkan pendapatan lebih dari biasanya.

2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan. Dapat dinilai dari keseriusan masyarakat dalam pembangunan. Desa Kerta sering mendapat bantuan dalam pembangunan infrastruktur jalan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Sayangnya, pemberian bantuan tersebut tidak didasari oleh niat yang tulus dilihat dari hasil pelaksanaan bantuan yang rusak, tidak lama setelah program tersebut dilaksanakan. Masyarakat akhirnya memperbaiki jalan yang rusak tersebut, ini menambah beban di masyarakat. Masyarakat yang tidak ingin ini terulang, merancang program seefektif dan seefisien mungkin, karena yang akan menggunakan itu adalah masyarakat sendiri. Kecil kemungkinan masyarakat akan menghasilkan *output* yang buruk. Jika dilihat dari Musrenbangdes, masyarakat cukup antusias dalam memberikan usulan terkait pelaksanaan program didisunnya dan sampai saat ini, Penulis melihat kondisi infrastruktur jalan dan gedung TK hasil program masih dalam kondisi yang sangat baik, berbeda dengan hasil program yang dilaksanakan pemerintah.
3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan. Setelah dibangun infrastruktur jalan masyarakat mulai merasakan dampak positif. Informasi yang penulis dapatkan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang sekarang sudah tidak termasuk dalam RTM lagi karena mampu meningkatkan penghasilannya. Penyebabnya karena mampu menjual lebih banyak dan juga lebih mahal karena akses yang sangat mudah sehingga mampu membeli alat transportasi berupa sepeda motor yang juga menunjang kegiatan sehari-hari selain untuk bekerja. Tingkat



Pendidikan di Desa Kerta juga rata-rata lulus SMP dan SMA, sehingga minimal lolos kualifikasi untuk bekerja sebagai buruh angkut ataupun karyawan swasta/niaga di perkotaan. Pemberian Beasiswa sampai tingkat SMA dari program PNPM Mandiri memacu anak-anak Desa Kerta untuk lebih bersemangat dalam mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal itu juga karena Pemerintah Desa Kerta sangat serius dalam hal pendidikan yang mereka anggap sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan desa.

Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara. Infrastruktur jalan dan Gedung TK adalah beberapa contoh pembangunan Infrastruktur prasarana fisik yang dilaksanakan di Desa Kerta sebagai program PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kerta telah berlangsung sejak tahun 2003 sewaktu masih bernama PPK. Kondisi jalan yang dibangun dan sudah berumur hampir 11 tahun ini masih dalam kondisi yang bagus. Gedung TK juga masih dalam kondisi yang bagus. Terlihat sekali masyarakat yang sangat peduli karena prasarana fisik tersebut merupakan faktor penting penunjang kesejahteraan hidup mereka.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Evaluasi Formal dan metode yang dirasa paling mendekati adalah Evaluasi Proses Retrospektif dimana evaluasi ini meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi Proses Retrospektif berfokus pada kegiatan aktivitas program yang berhubungan dengan keluaran dan dampak. Berikut adalah poin-poin yang didapatkan selama penelitian :

1. Masyarakat menjadi lebih kritis serta memiliki kemauan untuk berusaha.

Terbatasnya dana dan sumber daya membuat masyarakat mengarahkan seluruh pikirannya untuk mencari jalur alternatif. Kesungguhan masyarakat dalam menjalankan program berimbas ke pola pikir masyarakat yang mengutamakan efektifitas dan efisiensi selama proses pelaksanaan program. Minimnya dana yang didapat membuat masyarakat sangat memperhitungkan apakah suatu bahan itu sangat dibutuhkan atau tidak atau bisa dicarikan alternatif lain yang

lebih murah. Dalam hal ini proses pemberdayaan masyarakat telah berlangsung. Masyarakat juga paham dan patuh terhadap prosedur pelaksanaan program dan bagaimana sistem birokrasinya sehingga mampu untuk memperhitungkan waktu yang tepat dalam melaksanakan program.

Telah digambarkan kondisi geografis desa yang terletak di daerah pegunungan, dapat dipastikan kondisi medan selama pelaksanaan program pasti sangat berat, itupun jika cuaca mendukung. Masyarakat masih tetap mau bekerja untuk melaksanakan program sekalipun cuaca hujan. Dapat dipastikan kondisi medan akan semakin berat. Contoh dalam program pembuatan infrastruktur jalan beton, sebelum beton dicor terlebih dahulu badan jalan akan dibersihkan. Dalam cuaca hujan jalan yang tadinya telah dibersihkan akan menjadi kotor lagi, tapi itu tidak menyurutkan niat masyarakat.

2. Adanya kemauan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sebagian besar usulan yang diusulkan oleh masing-masing Dusun di Desa Kerta adalah tentang pembangunan infrastruktur. Masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki kebutuhan yang tinggi akan akses transportasi yang memudahkan masyarakat untuk memasarkan hasil tani/kebun mereka. Dengan adanya program PNPM pengadaan infrastruktur jelas sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang selama ini sangat susah untuk mengakses pasar. Kemudahan inilah yang membuat masyarakat untuk mau berusaha agar terlepas dari rantai kemiskinan. Pelaksanaan program pembangunan Gedung TK membuat masyarakat mulai menyadari tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan. Menyadari hal ini, Desa Kerta memberikan usulan pembangunan Gedung TK dan pemberian beasiswa bagi anak-anak

yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM). Kemauan mereka untuk pergi ke sekolah dan meningkatkan jenjang pendidikan adalah salah satu kemajuan, dimana sebagian besar masyarakat Bali yang tinggal di Perdesaan lebih mementingkan anaknya untuk bekerja di sawah/kebun daripada untuk sekolah karena biaya yang dikeluarkan lebih baik digunakan untuk sawah/kebun. Ditambah pula dukungan dari Pemerintah Desa Kerta kepada RTM untuk memprioritaskan pendidikan anak-anaknya melalui sosialisasi yang dilaksanakan langsung oleh Perbekel Desa Kerta.

3. Kesetaraan gender yang masih bias.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam PNPM mendapat apresiasi yang cukup bagus karena keterlibatan perempuan dari awal penetapan usulan hingga proses pelaksanaan program. Bahkan dalam tingkatan Kecamatan, diharuskan ada wakil perempuan dalam setiap delegasi. Sayangnya, keterlibatan perempuan disini terlihat seperti hanya untuk melaksanakan apa yang menjadi keharusan atau standar dalam PNPM. Peran perempuan seperti hanya sebagai ketentuan pelaksanaan program karena apabila salah satu desa tidak mengirimkan usulan dari perempuan, maka dalam perangkingan akan mendapatkan nilai yang kecil. Bisa saja dalam pemberian usulan terjadi ketidakseriusan atau hanya sekedar pendamping saja untuk meloloskan usulan-usulan yang lainnya.

4. PNPM berorientasi pada proyek tanpa campur tangan daerah.

Program PNPM Mandiri Perdesaan menitikberatkan pada pelaksanaan proyek untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Padahal tidak hanya proyek sarana maupun prasarana saja yang mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Bisa dengan pembuatan lapangan pekerjaan dengan mengolah hasil produksi desa, sehingga hasil yang didapat akan lebih banyak. Sisi buruk dari pembangunan infrastruktur adalah seandainya PNPM tidak berjalan lagi, maka tidak dijamin kelanjutan pelaksanaan programnya

mengingat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memasukkan seluruh anggaran PNPM menjadi Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan kata lain, pendanaan akan semakin sedikit dan program yang dicanangkan kemungkinan besar akan tidak berjalan. Disisi lain, PNPM Mandiri seakan tidak lagi memerlukan pelayanan dari Pemerintah Daerah mengingat seluruh pelaksanaan program mulai dari formulasi hingga implementasi bersumber dari masyarakat dan para pelaku umumnya adalah para elit desa dan fasilitator yang fokus pada kegiatan PNPM. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten hanya membuat regulasi-regulasi yang mendukung kegiatan program serta bantuan dalam pemberian dana bahkan pengawasan pendanaan juga dilakukan oleh masyarakat dan organisasi terkait di tingkat Kecamatan. Hal ini meminimalisir kemungkinan adanya bantuan sekedarnya dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Perencanaan kegiatan tahunan bersifat repetitif.

Masyarakat seakan terdoktrin dengan menganggap bahwa kegiatan pembenahan infrastruktur adalah yang harus menjadi prioritas utama. Disinilah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) harusnya berperan dengan memberikan saran-saran yang inovatif dan kreatif agar program berjalan secara optimal. Karena PNPM sendiri tidak hanya diperbolehkan untuk mendanai proyek infrastruktur, tapi juga kegiatan pelatihan ketrampilan masyarakat (non formal) dan juga kegiatan peningkatan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi dari sumber daya lokal walaupun tidak diperbolehkan untuk penambahan modal.

6. Dukungan pendanaan yang lambat serta kurangnya dana yang tersedia di Kecamatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendanaan berjalan secara lambat. Dari

sistem pencairan saja terlihat dana dibagi dalam beberapa tahapan sebelum akhirnya dana cair. Sistem yang lambat seperti ini membuat program berjalan setengah-setengah. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tanah longsor yang kemungkinan akan menimbun badan jalan mengingat pelaksanaan program dilakukan di daerah pegunungan yang rawan longsor. Begitu pula seperti yang terjadi pada tahun 2014, terjadi pemotongan anggaran sebesar 11,8% untuk PNPM tetapi usulan yang telah diterima di Kecamatan tidak boleh mengalami kekurangan atau harus sesuai dengan apa yang diusulkan. Jelas ini merupakan kendala tersendiri bagi masyarakat. Ditambah dengan naiknya harga karena inflasi atau kenaikan harga BBM. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus mencari dana swadaya agar program tetap berjalan ataupun dengan menyiasati bahan-bahan yang digunakan dalam program. Hasilnya pun tidak terlalu baik tetapi cukup layak untuk digunakan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Kerta telah berjalan dengan sangat baik serta sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa poin yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Dari segi pelaksanaan, PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kerta sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Kesungguhan para pelaku dan juga masyarakat menimbulkan keharmonisan yang berdampak positif pada hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Terbukti dengan minimnya kendala yang terjadi, terlihat bahwa para pelaku dan masyarakat bersungguh-sungguh berkeinginan untuk melaksanakan program secara baik.
2. Tingkat partisipasi masyarakat juga sangat baik. Melihat dari keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat miskin sebagai sasaran PNPM Mandiri dalam semua tingkatan Musyawarah yang terlaksana di Desa dan turut juga

dalam pengawasan pendanaan untuk program yang akan dijalankan menyebabkan minimnya kesempatan untuk melakukan penyelewengan pendanaan.

3. Masyarakat cenderung memprioritaskan pendidikan. Dengan adanya bantuan dari PNPM berupa beasiswa, masyarakat merasa lebih terbantu dalam hal memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.

Kurangnya kader yang terlatih dalam pembuatan desain dan penggambaran, serta kurangnya alat-alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan program memberikan sedikit kendala. Dana yang dipergunakan untuk meminjam sebenarnya bisa diarahkan ke hal yang lebih baik.

Dari hasil penelitian tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan :

1. Penambahan anggaran untuk PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk Pemerintah, diharapkan mampu untuk menambah anggaran PNPM Mandiri Perdesaan. Selain dampaknya bisa dirasakan dalam waktu singkat oleh masyarakat, PNPM Mandiri juga mendukung kemajuan pola pikir masyarakat untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Tambahan dana yang diberikan jelas akan mampu mengentaskan kemiskinan dengan lebih cepat. Jika diberikan dalam bentuk bantuan sosial atau program bantuan, diharapkan kewenangan untuk formulasi sampai dengan pelaksanaan diberikan secara langsung kepada masyarakat tanpa adanya intervensi seperti pencarian tender yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti apa yang sebenarnya bisa dicapai menurut perhitungan masyarakat, ternyata tidak bisa dilakukan karena banyaknya potongan ataupun perhitungan dalam tender.

2. Pemberian pelatihan terhadap KPMD.

Pelatihan dibutuhkan untuk para KPMD ini agar mampu untuk memberikan alternatif lain kepada masyarakat yang mungkin saja tidak pernah tersirat dalam pikiran masyarakat. Pelatihan ini seharusnya

dilaksanakan dengan pendanaan diluar Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) agar tidak mengurangi dana PNPM. Sejauh ini pelatihan yang dilaksanakan hanya untuk Fasilitator Kecamatan dan Aparat Desa.

3. PNPM diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal.

Orientasi PNPM terhadap proyek seakan mengesampingkan potensi lokal seperti persawahan / perkebunan. Contoh, inovasi apa yang dapat dihasilkan melalui limbah jeruk, apakah bisa dibuatkan pupuk atau hal lain yang mampu meningkatkan produksi. Perlu adanya suatu program yang dapat mengembangkan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Kelompok SPP banyak yang tidak bisa melanjutkan pinjaman karena tunggakan. Alasannya, karena apa yang mereka lakukan ternyata mereka belum memiliki pengalaman di bidang tersebut, seperti contoh pembuatan warung, sehingga mereka mengalami kesusahan dalam pengembalian modal.

4. Pemerintah memberikan bantuan dalam penyediaan alat kerja.

Membuat jalan beton digunung memerlukan air yang cukup banyak sehingga masyarakat cenderung membeli air. Jika pemerintah mampu memberikan bantuan, otomatis anggaran untuk pembelian air dapat dialihkan ke hal lain. Begitu pula dengan alat sewa berat lainnya. Memang dikhawatirkan pemberian bantuan dari pemerintah akan telat, tapi jika pemerintah memang serius menggarap, mungkin bisa dilakukan semacam *reimburse*. Karena dana yang tersedia itu sangatlah berarti.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2002). *Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Rajawali Pers, Jakarta
- Agustino, L. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama, Bandung.

Hakim, A. (2004). *Konflik Dalam Organisasi dan Kaitannya dengan Kualitas Pelayanan Publik*. Malang: LPUB.

Hill, M. J., & Hupe, P. L. (2002). *Implementing public policy: governance in theory and practice*. London: Sage.

Koentjaraningrat (2007.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. LPFEUI, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara R.I. (2003). *SANKRI: Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Perum Percetakan Republik Indonesia, Jakarta.

Lapananda, Y. (2013). *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*. Sinar Grafika, Jakarta

Mutrofin. (2005). *Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek)*. Yogyakarta: LaksbangPressindo

Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Ndraha, T. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.

Siagian, S. P. (2003). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.

Setyadi, Iwan Tritenty. (2005). *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). MPKD Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press, Malang.

Tjiptoherijanto, P., & Abidin, S. Z. (1993). *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. LP-FEUI, Jakarta.

Wahab, S. A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayumedia.,Malang.

#### **Dokumen / Karya Ilmiah / Jurnal**

Alim Sumarno (2013). *Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) (Studi Pada Pembangunan Irigasi Petani Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)*. UNESA.

Edward III, Merilee S. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.

Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta.

----- (2014). *Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Nasional Masyarakat Mandiri*. Jakarta.

Konsultan Manajemen Nasional. (2014). *Penataan Badan Kerjasama Antar Desa*. Parsons, W., & Parsons, W. D. (1995). *Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.

Pemerintah Desa Kerta. (2012). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kerta*.

Scioli, F. P., & Cook, T. J. (1975). *Methodologies for analyzing public policies*. Lexington Books.

Tim Pengelola Kegiatan Desa Kerta. (2013). *Usulan Kegiatan Rabat Beton Jalan Tempek Sendai Margatengah*. Payangan: TPK Kerta

Tim Pengendali PNPM Mandiri.(2009).*Materi Pelatihan Perbekel dan BPD*. Tim Pengendali PNPM Mandiri, Payangan.

#### **Dokumen Elektronik**

Anonymous (2011). Partisipasi Masyarakat – Teori Ringkas. Diakses tanggal 10 September 2014, dari <http://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/>

Luthfan (2012). Preman-pre mandi kah?. Diakses tanggal 10 September 2014 dari <http://luthfan-al.blogspot.com/2012/03/preman-pre-mandi-kah.html>

Kementerian Dalam Negeri (2003). PNPM Mandiri Perdesaan. Diakses tanggal 8 Juni 2014, dari <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=uu>

PNPM Barambai (2014). Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Diakses tanggal 10 September 2014, dari <http://pnpmbarambai.blogspot.com/2014/05/pto-2014.html>

PNPM Support Facility (2014). Keberlanjutan PNPM Wilayah Perdesaan. Diakses tanggal 8 Juni 2014, dari <http://pnpm-support.org/id/berita/keberlanjutan-pnpm-wilayah-perdesaan>

Rachmawan,H (2012). Evaluasi Kebijakan Publik. Diakses tanggal 10 September 2014, dari <http://hafiedrachmawan.blogspot.com/2012/09/pengertian-evaluasi-kebijakan-publik.html>

Risma Agiastari (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak*.Diakses tanggal 18 Agustus 2014 dari <http://repository.fisip-untirta.ac.id/117/>

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Diperoleh 5 September 2014, dari <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri/>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 75 Tahun 2013